



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2026

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmatNya, kami masih diberikan kemampuan untuk Menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana Renja Tahun 2026 ini disusun dalam upaya memberikan arahan/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2026 nanti.

Dalam Urusan Penanaman Modal, Renja ini merupakan kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Renja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta perannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kuala Tungkal, April 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

M. HAVIZ, S.E.

Pembina Tk I

NIP. 19740613 199602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	20
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	29
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	29
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	31
3.3 Program dan Kegiatan.....	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	44
BAB V PENUTUP	45
5.1 Kesimpulan.....	45
5.2 Saran	45
LAMPIRAN.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rancangan RKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rancangan RKPD), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dokumen perencanaan untuk perencanaan tahunan yang diawali penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan Renja mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Renja Tahun 2026 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2026 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122);
15. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
16. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2044 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2033 (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6); dan
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- Memberikan informasi hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan IV tahun 2024, Rencana kegiatan Tahun 2025, Rencana kegiatan Tahun 2026 dan Perkiraan maju Tahun Anggaran 2027.

2. Tujuan

- Sebagai dasar penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sitematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN III

- 2.1 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024
- 2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV
- 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun lalu dan capaian kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel T-C 29 sebagai Berikut :

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan komponen penunjang	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100
2.18.01.2.01	perencanaan, Pengaanggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	110 Buku	35 Buku	10 Buku	10 Buku	100%	10 Buku	65 Buku	59,09090909
2.18.01.2.01.6	penyusunan dokumen perencanaan dan perangkat daerah	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	110 Dokumen	45 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	65 Dokumen	59

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksannya Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	60 Bulan	83,3333333
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN	180 Orang/bulan	69 Orang/bulan	30 Orang/bulan	23 Orang/bulan	77%	12 Orang/bulan	104 Orang/bulan	58
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	60 Dokumen	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	60 Dokumen	100
2.18.01.2.05	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian dengan Baik	426 Paket	82 Paket	130 Paket	130 Paket	100%	71 Paket	283 Paket	66,4319248
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	426 Paket	82 Paket	130 Paket	130 Paket	100%	71 Paket	283 Paket	66,43
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Kelancaran Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah	72 Paket	36 Paket	93,333 3 Paket	12 Paket	13%	12 Paket	60 Paket	83,3333333
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/	72 Paket	36 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	60 Paket	83

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Bangunan Kantor	Penerangan Bangunan Kantor								
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	72 Paket	36 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	60 Paket	83
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Makan Minum Rapat	72 Paket	36 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	60 Paket	83
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	72 Paket	36 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	60 Paket	83
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	72 Dokumen	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	60 Dokumen	83
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Biaya Rapat/ Konsultasi	3000 Laporan	1500 Laporan	500 Laporan	701 Laporan	140%	500 Laporan	2701 Laporan	90
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	72 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	60 Laporan	83

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	72 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	60 Laporan	83
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharannya Barang Milik Daerah	60 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	60 Bulan	100
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dilakukan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajaknya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajaknya	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	100%	14 Unit	14 Unit	100
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksanya Pemeliharaan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Peralatan dan Mesin Lainnya								
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Bulan	2 Unit	100
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Kajian Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0 Dokumen	1 Dokumen	100
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Produk Hukum Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	0%	0 Dokumen	1 Dokumen	100
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Produk Hukum Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0 Dokumen	1 Dokumen	100,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Tersedianya Peta Potensi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen		Dokumen	Dokumen	
2.18.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Dokumen Revisi Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	1 Dokumen	100
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya minat investasi melalui penyediaan informasi dan promosi bagi calon investor	11 Calon Investor	1 Calon Investor	3 Calon Investor	10 Calon Investor	333%	2 Calon Investor	13 Calon Investor	118,181818 2
2.18.03.2.01	Penyelenggaraa n Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Tercapainya Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Daerah	11 Calon Investor	3 Calon Investor	3 Calon Investor	10 Calon Investor	333%	2 Calon Investor	15 Calon Investor	136,363636 4
2.18.03.2.01.01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	9 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	200%	2 Dokumen	6 Dokumen	66,67

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	1200 0 Izin	9.62 2 Izin	2000 Izin	2000 Izin	100%	200 0 Izin	13.622 Izin	113,516666 7
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Tercapainya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	1200 0 Izin	9.62 2 Izin	2000 Izin	2000 Izin	100%	200 0 Izin	13.622 Izin	113,516666 7
2.18.04.2.01.000 5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Dokumen	8 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	14 Dokumen	77,78
2.18.04.2.01.000 6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui	7502 Pelaku Usaha	8319 Pelaku Usaha	1500 Pelaku Usaha	4688 Pelaku Usaha	313%	150 0 Pelaku Usaha	14.507 Pelaku Usaha	193,38

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik								
2.18.04.2.01.000 7	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	34 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	100%	6 Pelaku Usaha	27 Pelaku Usaha	79,41
2.18.04.2.01.000 8	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	4500 Kegiatan Usaha	1303 Kegiatan Usaha	400 Kegiatan Usaha	541 Kegiatan Usaha	135%	400 Kegiatan Usaha	2.244 Kegiatan Usaha	49,87

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal	301 M	301 M	370 M	554,6 4 M	150%	440 M	509 M	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	301 M	429,6 M	370 M	554,6 4 M	150%	440 M	509 M	
2.18.05.2.01.04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	31 Kegiatan Usaha	18 Kegiatan Usaha	6 Kegiatan Usaha	6 Kegiatan Usaha	100%	6 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha	96,77
2.18.05.2.01.05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha	402 Pelaku Usaha	540 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	100%	80 Pelaku Usaha	700 Pelaku Usaha	174,13

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko								
2.18.05.2.01.06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	72 Kegiatan Usaha	45 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	100%	12 Kegiatan Usaha	69 Kegiatan Usaha	95,83
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas Sistem Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100%	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penerapan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100%	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100
2.18.06.2.01.02	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100%	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap hasil Renja Tahun 2024 merupakan evaluasi yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan Triwulan IV dengan mengacu pada Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja tahun 2024. Berdasarkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Triwulan IV Tahun 2024, predikat kinerja program seluruh adalah hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel TC.30 Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD berikut :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Taget Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terwujudnya pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat			A	A	A	A	A	A	A	A	
2	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat			301 M	370 M	440 M	509 M	283 M	554,64 M	153 M	122 M	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah memiliki komitmen bersama untuk menegakkan *good governance dan clean government*. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak hanya terbatas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang dikelola saja, tetapi juga banyak melakukan fungsi - fungsi penegakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan tuntutan masyarakat saat ini.

Adapun isu-isu strategis dalam penyelenggaraan fungsi perangkat daerah antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyusunan analisis dan sosialisasi peta potensi daerah pada para investor;
2. Tidak tersedianya data potensi yang akurat;
3. Tingkat persaingan antar daerah yang makin tinggi dalam Upaya menggaet calon investor yang bersedia menanamkan modalnya;
4. Belum optimalnya penggunaan media digital sebagai strategi promosi terbaru (Platform media social);
5. Belum optimalnya promosi investasi dan potensi daerah baik ditingkat regional, nasional maupun internasional;
6. Kualitas materi dan promosi belum mampu menarik dan menjangkau calon investor potensial;
7. Rapat Forum Group Discussion (FGD) jarang dilakukan untuk membahas strategi promosi terbaru.
8. Belum optimalnya keikutsertaan dalam pameran investasi daerah;
9. Belum optimalnya promosi investasi dan potensi daerah baik ditingkat regional, nasional maupun internasional;

10. Belum terintegrasinya aplikasi dan SOP antara DPMPSTSP dengan OPD Teknis, agar proses perizinan tidak lagi dilakukan secara manual;
11. Rekomendasi teknis masih memerlukan waktu yang lama;
12. Tim teknis perizinan masih berada di instansi masing-masing sehingga memperpanjang birokrasi dalam pemberian izin;
13. Belum maksimalnya penanganan pengaduan dan
14. Terjadinya perubahan-perubahan yang mendasar dan signifikan pada regulasi sehingga menimbulkan kontradiksi.

Dengan Pelayanan yang mudah, cepat dan transparan, diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga dapat menjadi ikon Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Penegakan Reformasi Birokrasi yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan menjadi Kantor Percontohan Zona Integritas dari KPK Republik Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan upaya-upaya agar Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang dikelola antara lain :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas yang tinggi. Setiap Sumber Daya Manusia (Pegawai) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat wajib menandatangani Pakta Integritas setiap tahunnya di hadapan Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan memahami Kode Etik yang telah ditetapkan.
2. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Pegawai) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan kegiatan dan program-programnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Penyelenggara Pelayanan Perizinan terdapat kendala-kendala yang dihadapi yaitu antara lain:

- Belum optimalnya penerapan dan standar oprasional prosedur tersebut untuk tiap-tiap proses penyelenggaraan perizinan
- Adanya keterbatasan Sumber Daya Mansuia baik kualitas maupun dalam mendukung pelaksanaan program
- Adanya keterbatasan sarana dan prasaran kerja yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program termasuk aplikasi sistem informasi dan komunikasi yang dimiliki belum menandai dalam memperlancar pelayanan publik
- Pemahaman masyarakat tentang pelayanan perizinan di DPMPTSP belum Optimal
- Implementasi waktu penyelesaian proses perizinan dan sesuai SOP belum Optimal
- Masih ada peraturan daerah yang belum dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk Teknis
 1. Pemahaman masyarakat tentang layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih rendah
 2. Pelaksanaan SOP Perizinan belum efektif

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 dilaksanakan pada bulan November 2024. Pada dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 pagu indikatif untuk tahun anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp. 15.487.000.000. Pada dokumen rancangan awal yang telah disusun pagu anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp. 12.745.000.000, telah berkurang sebesar Rp. 3.102.000.000. Pada tahapan Renja ini pagu anggaran yang dialokasikan

untuk tahun 2026 menjadi Rp. 10.708.103.000. Untuk detail besaran anggaran tiap sub kegiatan pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel T-C 31.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahap penyusunan Renja ini, sudah terdapat usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat yang diperoleh melalui Forum Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2025. Adapun usulan yang ditampung dapat dilihat pada table T-C 3.2.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota				
	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. TJB	Tersusunnya Dokumen IPRO	1 Dokumen	



Dokumentasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kamis 13 Februari 2025, bertempat di gedung Mal Pelayanan Publik Lantai 5.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ranwal					Rancangan		Catatan
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Penting
1	2	3	4	5	4	5	6
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan komponen penunjang	%	100	10.335.000.000	100	8.949.000.000	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perencanaan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dokumen	10	100.000.000	10	50.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	100.000.000	10	50.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksannnya Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	5.500.000.000	12	5.250.000.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	30	5.200.000.000	30	5.000.000.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	300.000.000	12	250.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian dengan Baik	Paket	150	105.000.000	150	105.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Paket	150	105.000.000	150	105.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	-	-	-	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Kelancaran Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah	%	100	1.370.000.000	100	1.010.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	25	250.000.000	25	20.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	60	250.000.000	60	150.000.000	

Ranwal					Rancangan		Catatan
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Penting
1	2	3	4	5	4	5	6
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	Paket	200	70.000.000	200	70.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	1.000	100.000.000	1.000	100.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Dokumen	24	50.000.000	24	20.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	1.000	650.000.000	1.000	650.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	Unit	15	1.550.000.000	11	1.250.000.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	5	1.000.000.000	1	700.000.000	
Pengadaan Mabel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	5	50.000.000	5	50.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	5	500.000.000	5	500.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Terpenuhinya Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor	Bulan	12	860.000.000	12	834.000.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	36.000.000	12	10.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	24.000.000	12	24.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	800.000.000	12	800.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	%	100	850.000.000	100	450.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dilakukan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajaknya	Unit	4	400.000.000	4	200.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	15	100.000.000	15	150.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	20	100.000.000	20	50.000.000	
Pemeliharaan / Rehap gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	1	250.000.000	1	50.000.000	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Kajian Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	Dokumen	3	690.000.000	7	552.319.000	

Ranwal					Rancangan		Catatan
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Penting
1	2	3	4	5	4	5	6
Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Produk Hukum Daerah	Dokumen	1	90.000.000	5	90.001.000	
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ provinsi dalam pemberian Fasilitas/ Insentif dan kemudahan penanaman modal	Dokumen	-	-	-	-	
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	5	90.000.000	5	90.001.000	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dokumen	2	600.000.000	2	462.318.000	
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabuapten/ Kota	Dokumen	1	300.000.000	1	162.310.000	
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	300.000.000	1	300.008.000	
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Calon Investor	Calon Investor	2	350.000.000	5	684.364.000	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Promosi Potensi dan Pelaung Investasi di Daerah sesuai Stretegis yang direncanakan	Calon Investor	2	350.000.000	5	684.364.000	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Pameran Investasi	2	250.000.000	4	472.044.000	
Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	350.000.000	1	212.320.000	
Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Total Perizinan dan Nin Perizinan yang diterbitkan	Izin	2.000	400.000.000	2.000	400.000.000	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Izin	2.000	400.000.000	2.000	400.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	100.000.000	3	100.000.000	
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	1.500	100.000.000	1.500	100.000.000	
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	6	100.000.000	6	100.000.000	

Ranwal					Rancangan		Catatan
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Penting
1	2	3	4	5	4	5	6
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	500	100.000.000	500	100.000.000	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Rencana Investasi	Milyar	509	650.000.000	509	121.966.000	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	Milyar	509	650.000.000	509	121.966.000	
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.	6	100.000.000	6	26.800.000	
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	240	350.000.000	240	69.056.000	
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	12	200.000.000	12	24.310.000	
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterapkan	Sistem Informasi	1	70.000.000	1	37.180.000	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Sistem Informasi	1	70.000.000	1	37.180.000	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1	70.000.000	1	37.180.000	
				12.495.000.000		10.744.829.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Pada tahun 2024, Indonesia mencapai beberapa capaian penting dalam bidang penanaman modal. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. **Realisasi Investasi** : Capaian investasi sepanjang tahun 2024 mencapai Rp 1.714,2 triliun, yang merupakan peningkatan sebesar 20,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. **Serapan Tenaga Kerja** : Investasi tahun 2024 menyerap tenaga kerja sebanyak 2.456.130 orang.
3. **Pertumbuhan Positif** : Triwulan IV tahun 2024 menunjukkan tren pertumbuhan positif sebesar 23,8% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023.
4. **Pengolahan Mineral** : Dilakukan groundbreaking pengolahan timah sebesar Rp 1,2 triliun di Batam.
5. **Ekonomi Capai 8%** : Pemerintah berhasil mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%

Pada tahun 2025 ini, Indonesia memiliki beberapa target nasional dalam bidang penanaman modal yang ambisius. Berikut adalah beberapa target utama:

1. **Target Investasi** : Pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 1.905 triliun untuk tahun 2025, dengan total investasi dari 2025-2029 mencapai Rp 13.032 triliun. Target ini diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 82%.
2. **Sektor Prioritas** : Pemerintah akan fokus pada beberapa sektor prioritas, termasuk hilirisasi sumber daya alam, energi baru dan terbarukan, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi digital, pusat data, serta industri manufaktur yang berorientasi ekspor.
3. **Insentif Investasi** : Pemerintah menawarkan berbagai insentif untuk menarik investasi, seperti super tax deduction hingga 300%

untuk riset dan pengembangan, serta 200% untuk pelatihan operasional.

4. **Pengembangan Infrastruktur** : Investasi besar dalam pengembangan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas.
5. **Peningkatan Daya Saing Global** : Kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing global melalui insentif dan dukungan bagi sektor-sektor strategis.

Kebijakan nasional bidang penanaman modal di Indonesia pada tahun 2026 akan terus berfokus pada beberapa aspek penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa kebijakan yang diusulkan:

1. **Penguatan Infrastruktur Digital** : Investasi besar dalam pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung ekonomi digital dan meningkatkan konektivitas.
2. **Peningkatan Daya Saing Global** : Kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing global melalui insentif dan dukungan bagi sektor-sektor strategis.
3. **Pengembangan Sektor Pertanian dan Perikanan** : Fokus pada modernisasi sektor pertanian dan perikanan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk.
4. **Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan** : Mendorong investasi dalam sektor penelitian dan pengembangan untuk menciptakan ekonomi berbasis pengetahuan.
5. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia** : Program-program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi.
6. **Dukungan terhadap UMKMK** : Terus memberikan insentif dan dukungan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam ekonomi.

7. **Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan** : Mendorong investasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk mendukung keberlanjutan ekonomi.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan pada akhir periode Renstra. Berdasarkan tujuan tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan Tujuan dan Sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun kedepan, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya (SDM, dana dan sarana/prasarana) yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel berikut :

VISI :	Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)		
MISI III :	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk Pelayanan Publik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatkan Kualitas aparatur pelayanan sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada investor dengan cara mengubah pemahaman (mindset) aparatur dari dilayani menjadi melayani	Meningkatkan kualitas dan penambahan SDM
		Menerapkan sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Sehingga tercipta pelayanan yang mudah, efektif, transparan dan akuntabel	Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta implementasi sistem pelayanan perizinan dengan pusat (OSS)
		Menerapkan pola online system dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat untuk mendorong penanaman modal mengajukan perizinan secara online	Memenuhi kebutuhan sarpras
			Meningkatkan koordinasi antar OPD teknis

			Melaksanakan penyederhanaan, standarisasi prosedur dan pengembangan proses perizinan secara paralel untuk mempercepat proses perizinan
--	--	--	--

MISI IV :		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Penanaman Modal yang Berkelanjutan	Meningkatnya Investasi Daerah	Memperkuat data peluang investasi yang prospektif untuk dikembangkan	Meningkatkan layanan promosi dan investasi
		Promosi peluang investasi yang terencana dengan memperkuat basis data di website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta menggalang temu usaha dengan calon investor potensial di dalam dan luar negeri	Meningkatkan pemantauan dan pengawasan investasi
		Menjamin kepastian berusaha dengan merespon dan menyelesaikan secara cepat setiap kondisi yang berpeluang menciptakan konflik baik itu berkaitan dengan kebijakan maupun perselisihan lainnya	Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
		Merancang dan menerbitkan peraturan daerah yang mampu memberikan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	

Sasaran Strategis Perangkat Daerah telah ditetapkan didalam rencana strategis perangkat daerah. Sasaran strategis ini menjadi indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah. Untuk tahun anggaran 2026 sasaran strategis perangkat daerah / IKU sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	A
2	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	509 Milyar Rupiah

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersumber dari dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Oleh karena itu dalam pendanaan lebih difokuskan pada program dan kegiatan yang memiliki manfaat bagi peningkatan perijinan dan non perijinan serta Perizinan penanaman modal dan Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hal ini dapat digambarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan yang akan digunakan pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1) Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah

2) Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administarsi Pelaksanaan Tugas ASN

3) Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

4) Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instaliasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD

5) Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6) Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7) Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

1) Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupate/ Kota

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

2) Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota

- Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal

1) Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota
- Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

1) Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemerian Fasilitas/ Insentif daerah

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1) Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1) Kegiatan : pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Untuk Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2025 sudah mengalami penyesuaian dengan KepMenDagri Nomor : 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun mengenai uraian kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel TC. 33 berikut :

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan komponen penunjang		100 %	8.949.000.000		100 %	8.949.000.000
X.XX.01.2.01	perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja		10 %	50.000.000		10 %	50.000.000
X.XX.01.2.01.0001	penyusunan dokumen perencanaan dan perangkat daerah	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Dokumen	50.000.000		10 Dokumen	50.000.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksannnya Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Bulan	5.250.000.000		12 Bulan	5.250.000.000
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanjung Jabung Barat	30 Org/Bulan	5.000.000.000		30 Org/Bulan	5.000.000.000
X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Dokumen	250.000.000		12 Dokumen	250.000.000
X.XX.01.2.05	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian dengan Baik		150 Paket	105.000.000		150 Paket	105.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kab. Tanjung Jabung Barat	150 Paket	105.000.000		150 Paket	105.000.000
X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya SDM Aparatur	Kab. Tanjung Jabung Barat	0 Org	-		35 Org	-
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Kelancaran Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah		100 %	1.010.000.000		100 %	1.010.000.000
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Paket	20.000.000		12 Paket	20.000.000
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Paket	150.000.000		12 Paket	150.000.000
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Makan Minum Rapat	Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Paket	70.000.000		12 Paket	70.000.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Paket	100.000.000		12 Paket	100.000.000
X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Tanjung Jabung Barat	24 Dokumen	20.000.000		24 Dokumen	20.000.000
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Biaya Rapat/ Konsultasi	Kab. Tanjung Jabung Barat	1000 Laporan	650.000.000		1000 Laporan	650.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya peralatan gedung kantor		11 Unit	1.250.000.000		155 Unit	1.250.000.000
X.XX.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Kab. Tanjung Jabung Barat	1 unit	700.000.000		5 unit	700.000.000
X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mabel	Jumlah Unit Pengadaan Meubelair Kantor	Kab. Tanjung Jabung Barat	5 unit	50.000.000		60 unit	50.000.000
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Kab. Tanjung Jabung Barat	5 Unit	500.000.000		90 Unit	500.000.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor		12 Bulan	834.000.000		36 Bulan	834.000.000
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Laporan	10.000.000		12 Laporan	10.000.000
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Pemakaian Telpn, Air dan Listrik	Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Laporan	24.000.000		12 Laporan	24.000.000
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Laporan	800.000.000		12 Laporan	800.000.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharannya Barang Milik Daerah		100 %	450.000.000		100 %	450.000.000
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dilakukan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajaknya	Kab. Tanjung Jabung Barat	4 Unit	200.000.000		6 Unit	200.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajaknya	Kab. Tanjung Jabung Barat	15 Unit	150.000.000		28 Unit	150.000.000
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tanjung Jabung Barat	20 Unit	50.000.000		20 Unit	50.000.000
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Unit	50.000.000		1 Kali	50.000.000
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Kajian Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten		7 Dokumen	552.319.000		5 Dokumen	552.319.000
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Produk Hukum Daerah		5 Dokumen	90.001.000		5 Dokumen	90.001.000
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Tanjung Jabung Barat	- Dokumen	-		- Dokumen	-
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kab. Tanjung Jabung Barat	5 Dokumen	90.001.000		5 Dokumen	90.001.000
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Tersedianya Peta Potensi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat		2 Dokumen	462.318.000		- Dokumen	462.318.000
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Dokumen	162.310.000		- Dokumen	162.310.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	300.008.000			300.008.000
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya minat investasi melalui penyediaan informasi dan promosi bagi calon investor		5 Dokumen	684.364.000		3 Dokumen	684.364.000
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Tercapainya Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Daerah		5 Dokumen	684.364.000		3 Dokumen	684.364.000
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	4 Dokumen	472.044.000		2 Dokumen	472.044.000
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota		1 Dokumen	212.320.000		1 Dokumen	212.320.000
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal		2.000 Izin	400.000.000		2.000 Izin	400.000.000
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Tercapainya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu		2.000 Izin	400.000.000		2.000 Izin	400.000.000
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	3 Dokumen	100.000.000		4 Dokumen	100.000.000
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Tanjung Jabung Barat	1500 Pelaku Usaha	100.000.000		2000 Pelaku Usaha	100.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Tanjung Jabung Barat	6 Pelaku Usaha	100.000.000		12 Pelaku Usaha	100.000.000
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kab. Tanjung Jabung Barat	500 Kegiatan Usaha	100.000.000		36 Kegiatan Usaha	100.000.000
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal		509 M	121.966.000		509 M	121.966.000
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal		509 M	121.966.000		509 M	121.966.000
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Tanjung Jabung Barat	6 Kegiatan Usaha	28.600.000		24 Kegiatan Usaha	28.600.000
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Tanjung Jabung Barat	240 Pelaku Usaha	69.056.000		100 Pelaku Usaha	69.056.000
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Tanjung Jabung Barat	12 Kegiatan Usaha	24.310.000		20 Kegiatan Usaha	24.310.000
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas Sistem Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		1 Dokumen	37.180.000		1 Dokumen	37.180.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penerapan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik		1 Dokumen	37.180.000		1 Dokumen	37.180.000
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Dokumen	37.180.000		1 Dokumen	37.180.000
	Jumlah				10.744.829.000			10.744.829.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2026 sesuai dengan Renstra yang sudah ada, target Indikator Utama (IKU) adalah Nilai A untuk pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan Masyarakat dan 509 Milyar Rupiah untuk Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun sumber pendanaan pada tahun 2026 berasal dari dan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sumber pendanaan lain seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik bila ada.

Tabel 4.1

Daftar Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Anggaran	326.122.000	350.736.000	406.900.000	586.411.000	0	0

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari Ranwal Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Target IKU Tahun 2024 untuk Nilai IKM telah tercapai pada triwulan ke empat;
2. Target IKU Tahun 2024 untuk Nilai Investasi telah tercapai pada triwulan ke empat;
3. Target IKU Tahun 2026 untuk Nilai IKM adalah A;
4. Target IKU Tahun 2026 untuk Nilai Investasi adalah 509 Milyar Rupiah;
5. Terdapat perubahan nomenklatur subkegiatan terkait terbitnya Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
6. Pada Tahun 2026, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 6 Program, 12 Kegiatan dan 33 Subkegiatan;
7. Pagu indikatif untuk Tahun 2026 adalah Rp. 10.708.103.000,-.

5.2 Saran

Terkait penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Proyeksi pada tabel Tahun 2026 diperkirakan Nilai Investasi akan menurun menjadi 210 Milyar Rupiah sedangkan Target Renstra pada tahun 2026, Nilai investasi ditargetkan 509 Milyar Rupiah. Penetapan target 2026 perlu mendapat perhatian dan pertimbangan yang lebih matang.

LAMPIRAN

BERITA ACARA

Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nomor : 000.7/ 33 / PMPTSP/II/2025

Pada hari ini Kamis tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi Asmara Dian Putra, S.T.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing – masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil Keputusan kelompok diskusi, maka pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 13 Februari 2025

Jam : 08.30 s.d. selesai

Tempat : Gedung Mal Pelayanan Publik Lt. 5

Forum Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026

MENYEPAKATI

KESATU : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah;

KEDUA : Menyepakati rancangan Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum pada LAMPIRAN II berita acara ini;

KETIGA : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;

KEEMPAT : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I, II, III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik, Lantai 2 Jl. Jend. Sudirman
KUALA TUNGKAL
Kode Pos 36557 Website : dpmtsp.tanjabbarkab.go.id

Forum Perangkat Daerah

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

TEMPAT : Ruang Rapat Berkah 5 Mal Pelayanan Publik
HARI/TANGGAL : Kamis, 13 Februari 2025
JAM : 08.30 Wib s.d Selesai

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2	Rita Morawati	sekretaris DPMTSP	2
3	Mohfuzar.	Kabid.	3
4	Yeni gusman	Bupren	4
5	m. Yusuf	Dupren	5
6	Nurhamdi	IBAN II	6
7	Amgob A. Surtanudin	sekdis DUKCAPL	7
8	Andrizal	DPMTSP	8
9	Jana Rina Prasetya	Aktor	9
10	Kj. SAL ISTAN.	pedal.	10
11	pug'lestari. S. firda	Dinkes	11
12	Riky. A	DPMTSP	12
13	Suhana Sulastri	Dinas Perikanan	13
14	Ardiansyah	Dinkes	14
15	Gary	Kominfo	15
16	Surya	Red.	16
17	Eugianto	DPUPP	17
18	Sri wahyuni	JF. Analis kabipaku	18
19	Asfiah Jamul	Pmpmp	19
20	Umar A	Dpmp	20
21	Agustina Putra	DPMTSP	21
22	ASER Ramadani	DPMTSP	22
23	DERI PUTRA R.	DPMTSP	23
24	Nurfarida	DPMTSP	24
25	Eka Sriwanguni	DPMTSP	25
26	Rapka DITAKI	"	26
27			27
28			28
29			29
30			30
31			31

Lampiran II : Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah DPMPTSP Kab. Tanjab Barat

Nomor : 000.7/ 33 /PMPTSP/2025

Tanggal : 13 Februari 2025

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Ranwal		Catatan Penting
			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyediaan komponen penunjang	%	100	10.335.000.000	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perencanaan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dokumen	10	100.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	100.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksannnya Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	5.500.000.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	30	5.200.000.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	300.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terseleenggaranya Administrasi Kepegawaian dengan Baik	Paket	150	105.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Paket	150	105.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	-	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Kelancaran Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah	%	100	1.370.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	25	250.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	60	250.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	Paket	200	70.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	1.000	100.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Dokumen	24	50.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	1.000	650.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	Unit	15	1.550.000.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan Dinas Operasional atau laporan yang disediakan	Unit	5	1.000.000.000	
Pengadaan Mabel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	5	50.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	5	500.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Terpenuhinya Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor	Bulan	12	860.000.000	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Ranwal		Catatan Penting
			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	36.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	24.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	800.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	%	100	850.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dilakukan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajaknya	Unit	4	400.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	15	100.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	20	100.000.000	
Pemeliharaan / Rehap gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	1	250.000.000	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Kajian Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	Dokumen	7	690.000.000	
Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Produk Hukum Daerah	Dokumen	5	90.000.000	
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ provinsi dalam pemberian Fasilitas/ Insentif dan kemudahan penanaman modal	Dokumen	-	-	
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	5	90.000.000	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Dokumen	2	600.000.000	
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabuapten/ Kota	Dokumen	1	300.000.000	
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	300.000.000	
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Calon Investor	Calon Investor	3	600.000.000	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Promosi Potensi dan Pelaung Investasi di Daerah sesuai Stretegis yang direncanakan	Calon Investor	3	600.000.000	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	Pameran Investasi	2	250.000.000	
Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	350.000.000	
Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Total Perizinan dan Nin Perizinan yang diterbitkan	Izin	2.000	400.000.000	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Izin	2.000	400.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	100.000.000	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Ranwal		Catatan Penting
			Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	1.500	100.000.000	
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	6	100.000.000	
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	500	100.000.000	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Rencana Investasi	Milyar	509	650.000.000	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	Milyar	509	650.000.000	
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.	6	100.000.000	
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	240	350.000.000	
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	12	200.000.000	
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterapkan	Sistem Informasi	1	70.000.000	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Sistem Informasi	1	70.000.000	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1	70.000.000	
				12.745.000.000	

Nomor : 000.7/ 33 /PMPTSP/2025

Tanggal : 13 Februari 2025

Daftar Saran dan Masukan terhadap Ranwal Renja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026

1. Dari Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda menyarankan Dinas PMPTSP untuk :
 - a. menyusun dokumen IPRO untuk meningkatkan nilai jual Kabupaten sehingga menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. berpedoman kepada Prioritas Pembangunan RKPD 2026 antara lain :
 - 1) Tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif
 - 2) Produktivitas ekonomi kabupaten dan hilirisasi UMKM berbasis SDA
 - 3) Peningkatan dan Pemerataan pembangunan infrastruktur daerah
 - 4) Peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial dan ketenagakerjaan
 - 5) Peningkatan ketentraman dan ketertiban serta investasi
 - 6) Peningkatan ketangguhan sosial budaya dan ekologi
 - c. melaksanakan efisiensi belanja berpedoman kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.
2. Dari Inspektur Pembantu Wilayah III menyampaikan bahwa akan dilakukan Review terhadap RKA dan penilaian SAKIP yang perlu menjadi perhatian Dinas PMPTSP.
3. Usulan dari Sekretaris Dinas PMPTSP kepada Dinas PUPR untuk Pembangunan Gedung arsip dan tempat Sampah.
4. Usulan dari Dinas Kesehatan untuk memberlakukan pengurusan izin secara manual bila aplikasi terjadi gangguan.